

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA YANG
TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN BATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo)**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

MARIA LANSIANA REMBU
2021110213

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA YANG
TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN BATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo)

SKRIPSI

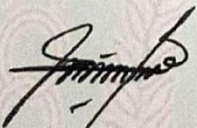
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum

DISUSUN OLEH:

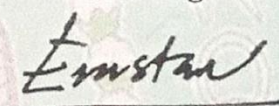
MARIA LENSIANA REMBU
20211110213

Disetujui

Pembimbing I

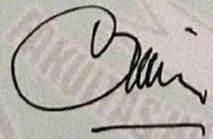

Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum
NIDN: 0814077102

Pembimbing II


Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum
NIDN: 0820046904

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA YANG
TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN BATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo)

Disusun Dan Diajukan Oleh

Maria Lensiana Rembu
2021110213

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan
Didepan dewan Penguji Skripsi pada :

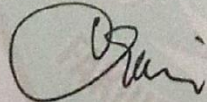
Hari : Kamis
Tanggal : 07 Agustus 2025

Tim Penguji

1. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum.
(Ketua Penguji)
2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum.
(Sekretrais Penguji)
3. Yohanes Pande, S.H.,M.H.
(Anggota)
4. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum.
(Anggota)
5. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum.
(Anggota)

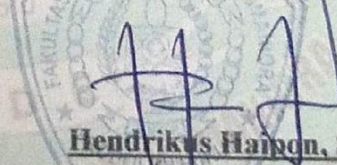
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES



Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN. 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES



Hendrikus Harpon, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Lensiana Rembu
Nim : 2021110213
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo)”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025



Maria Lensiana Rembu
2021110213

MOTTO

"Kebenaran tidak butuh kekuasaan, ia hanya butuh keberanian untuk ditegakkan."

Maria Lensiana Rembu

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan atas dukungan serta doa dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orangtua tercinta Bapak Ardianus Dawi dan Mama Bernadeta Siti yang telah memberikan segala dukungan moril maupun materil dan doa bagi penulis serta bersusah payah dalam membiayai penulis selama berada dibangku pendidikan dan yang selalu setia menantikan keberhasilan penulis.
3. Adik-adik tersayang, Yeskiel Vitalis Dawi dan Margareta Tania No'o yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Flores ini.
4. Kakak Aldi dan kakak Toti yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta memberikan nasihat kepada penulis untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seangkatan yang selalu hadir dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
6. Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora program studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
7. Almamaterku tercinta Universitas Flores.
8. Kepada diri saya sendiri Maria Lensiana Rembu yang mampu bertahan dan meyakinkan diri sendiri bahwa semua akan indah pada waktunya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo) ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan Skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tunjukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A., yang telah memberikan Pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian serta Dosen Pembimbing II yang dengan

segala daya upaya membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Ibu Gratiana Sama S,PD.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
8. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
9. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H.,M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
11. Bapak Yohanes Zakarias Rhaki selaku Kepala Desa Rapowawo, dan Bapak Darius Meka, SE selaku Camat Nangapanda yang penulis wawancarai yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi selama penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebajikan. peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, serta para Akademisi Hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan keilmuan khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Agustus 2025

Maria Lensiana Rembu
2021110213

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Penerapan Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Kampung Kekadori Desa Rapowawo), Maria Lensiana Rembu, Nim: 2021110213

Penelitian ini menganalisis Penerapan Sanksi Administratif bagi Kepala Desa yang Tidak Menjalankan Kewajiban dalam Menyelesaikan Perselisihan Batas Tanah di Kampung Kekadori, Desa Rapowawo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Studi kasus ini berfokus pada konflik batas tanah antara keluarga Martinus dan Sebastianus yang berlarut-larut sejak tahun 2020, di mana kepala desa dinilai tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai mediator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, menggabungkan studi lapangan melalui wawancara dengan kepala desa dan camat, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif terhadap kepala desa belum diterapkan secara efektif, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian sementara. Faktor penghambatnya meliputi: (1) faktor internal, seperti keterbatasan pemahaman hukum administrasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan wewenang camat dalam menjatuhkan sanksi; serta (2) faktor eksternal, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pengaruh hubungan kekeluargaan, dan kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pelaporan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kepala desa melalui pelatihan hukum, peningkatan pengawasan oleh camat, dan edukasi masyarakat tentang hak mereka dalam menuntut penyelesaian perselisihan batas tanah secara adil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah lebih tegas dalam menegakkan sanksi administratif demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan di tingkat desa.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Perselisihan, Batas Tanah,

ABSTRACT

This thesis is titled: *The Implementation of Administrative Sanctions for Village Heads Who Fail to Fulfill Their Obligations in Resolving Land Boundary Disputes in the Community of Kampung Kekadori, Rapowawo Village, Nangapanda Subdistrict, Ende Regency, as Viewed from Law Number 3 of 2024 Concerning Villages*, by Maria Lensiana Rembu, Student ID: 2021110213.

This study analyzes the Implementation of Administrative Sanctions for Village Heads Who Do Not Fulfill Their Obligations in Resolving Land Boundary Disputes in Kekadori Hamlet, Rapowawo Village, based on Law Number 3 of 2024 concerning Villages. This case study focuses on the land boundary conflict between the Martinus and Sebastianus families that has been protracted since 2020, where the village head is deemed not to have optimally carried out his obligations as a mediator. This study uses an empirical juridical method with a sociological approach, combining field studies through interviews with village heads and sub-district heads, as well as a literature review of related laws and regulations. The results of the study indicate that administrative sanctions against village heads have not been implemented effectively, even though Law Number 3 of 2024 has regulated the mechanisms for verbal warnings, written warnings, and temporary dismissal. Inhibiting factors include: (1) internal factors, such as limited understanding of administrative law, weak coordination between institutions, and unclear authority of sub-district heads in imposing sanctions; and (2) external factors, such as low community participation in village deliberations, the influence of family ties, and a lack of outreach regarding reporting mechanisms. These findings indicate the need to strengthen the capacity of village heads through legal training, increased supervision by sub-district heads, and community education about their rights to demand fair resolution of land boundary disputes. Therefore, this study recommends that local governments be more assertive in enforcing administrative sanctions to ensure legal certainty and justice at the village level.

Keywords: Administrative Sanctions, Land Boundary Dispute,

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I_PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Lokasi Penelitian	11
1.8 Analisis Data	12
1.9 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II_KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Sanksi Administratif.....	13
2.2. Pengertian Sanksi, Tujuan Sanksi dan Macam-Macam Sanksi.....	14
2.3. Pengertian Kepala Desa.....	17
2.4. Kewajiban Kepala Desa	19
2.5. Pengertian Sengketa	21
2.6. Pengertian Batas Tanah	22

BAB III PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA YANG TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM MENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA	25
3.1. Kronologi Masalah	25
3.2. Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas-Tugasnya	27
3.3. Sanksi Administratif Bagi Kepala Desa Yang Tidak Menjalankan Kewajiban	29
3.4. Langkah-langkah yang diambil dalam proses penyelesaian perselisihan batas tanah	37
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA YANG TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS TANAH	39
4.1. Faktor Internal	39
4.2. Faktor Eksternal	46
BAB V PENUTUP.....	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	